



**PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN  
KELAS IB**

# 2019

## PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN



Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111  
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179



[www.pn-pangkalanbun.go.id](http://www.pn-pangkalanbun.go.id)



[pangkalanbunpn@gmail.com](mailto:pangkalanbunpn@gmail.com)



# **PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2019**

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN  
KELAS IB**

**Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111  
Telpon (0532) 21014 Fax (0532) 21179**

**2019**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A. GD. AGUNG PARNATA,SH., CN.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama : Dr. H. SYAHRAL SIDIK, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

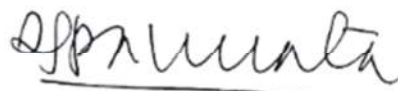
Pangkalan Bun, 2 Januari 2019

**Pihak Kedua**



**Dr. H. SYAHRAL SIDIK, SH., MH.**  
NIP. 19570503 198403 1 002

**Pihak Pertama**



**A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.**  
NIP. 19721128 199903 1 011

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana	20%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	95 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
2.	<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh pada Pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3.	<b>Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Nihil
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Nihil
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	50 %
5.	<b>Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal</b>	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %
		c. Persentase pemanfaatan <i>database</i> untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100 %
		d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	30 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif	a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif	90 %
		b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian	90 %
		c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	40 %
		d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif	100 %
7.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	95 %
		b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100 %
		c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja	98 %
		d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	100 %

Kegiatan:

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan manajemen Peradilan Umum

Anggaran:

- Rp. 4.143.279.000,-
- Rp. 13.000.000,-
- Rp. 87.700.000,-

Pangkalan Bun, 2 Januari 2019



**Pihak Kedua**  
**Dr. H. SYAHRIL SIDIK, SH., MH.**  
 NIP. 19570503 198403 1 002

**Pihak Pertama**

**A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.**  
 NIP. 19721128 199903 1 011



**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**  
**Nomor : W16-U3/042/KPN/SK/I/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2018 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. Bahwa, untuk melaksanakan penyusunan Laporan Tahunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP tahun 2019 dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Laporan;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penyusunan laporan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Memperhatikan : Surat KEtua PEngadilan Tinggi Palangkaraya Nomor W16-U/1399/OT.01.2/XI/2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- PERTAMA** : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan
- KEDUA** : Menugaskan Tim Penyusun Laporan untuk menyusun:
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
  2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama( IKU)
  3. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015- 2019
  4. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020
  5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN KELAS IB**



**A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN**  
**NIP. 19721128 199903 1 011**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran:  
Keputusan Ketua Pengadilan  
Negeri Pangkalan Bun W16-  
U3/042/KPN/SK/I/2019

**TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2018**

No	Nama /NIP	Jabatan	Ditunjuk /diangkat Sebagai
1.	Iman Santoso, SH.,MH.	Hakim	Ketua Tim
2.	Yohanis, SH.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
3.	Husni Thamrin, ST.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariat
4.	Yudha Pradana P., A.Md.	Plt. PTIP	Sekretaris
5.	Mantiko Sumanda M, SH.,M.Kn.	Hakim	Anggota
6.	Ucok Richon Manik, SH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Jurmani, SH.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Hariyanto	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Deni Nurmasyah, SE.	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
10.	Chanro Simamora, SH.	Kasubag Kepegawaian dan ORTALA	Anggota



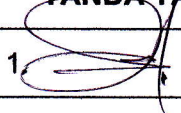
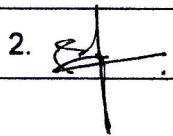

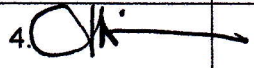

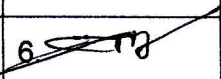
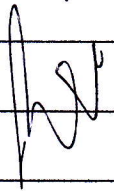
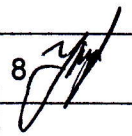
**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BUN KELAS IB**

*Handwritten signature in blue ink.*

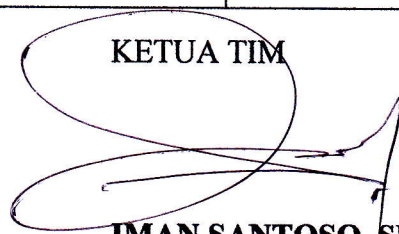
**A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN  
NIP. 19721128 199903 1 011**

**ABSENSI RAPAT  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

Tanggal : 2 Januari 2019  
 Acara : Rapat penyusunan SAKIP

NO	NAMA	TANDA TANGAN/ PARAF	KETERANGAN
1	IMAN SANTOSO	1. 	
2	HUSNI TRAGAWAN		2. 
3	YUDHA PRADANA	3. 	
4	JURMANI		4. 
5	HARIYANTO.	5. 	
6	HR. MARIK.		6. 
7	Chanso Samaras	7. 	
8	Yudha Pradana f		8. 
9		9.	
10			10.
11		11.	
12			12.
13		13.	
14			14.
15		15.	

KETUA TIM



**IMAN SANTOSO, SH.,MH**  
**NIP. 19760513 200805 1 001**





**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**

Jl. SutanSyahrir No 16 Pangkalan Bun. 74111

Telp.( 0532 ) 21014, 21179 Fax.(0532) 21179

Website: [www.pn-pangkalanbun.go.id](http://www.pn-pangkalanbun.go.id) e-Mail: [pangkalanbunpn@gmail.com](mailto:pangkalanbunpn@gmail.com)

Pangkalan Bun, 2 Januari 2019

Nomor : 002/RPT/I/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Rapat Penyusunan SAKIP

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu / Saudara (i)

.....  
.....

Di -

**TEMPAT**

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat dalam rangka Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Januari 2019

Waktu : 14.00 s/d selesai

Agenda : Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilits Kinerja Pemerintah tahun 2018

Tempat : Ruang Mediasi Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

untuk itu diminta kepada seluruh Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Laporan SAKIP agar menghadiri acara tersebut

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA TIM

IMAN SANTOSO, SH.,MH.

NIP. 19760513 200805 1 001

FORM NOTULEN RAPAT  
NOTULEN RAPAT PIMPINAN/ MANAJEMEN  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

I. Pelaksanaan

- Tempat : Ruang Mediasi
- Hari/tanggal : Rabu, 2 Januari 2019
- Waktu : 14.00 WIB
- Agenda :

II. Pemimpin Rapat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Dalam rapat ini Pimpinan Rapat adalah : IMAN SANTOSO, SH., MH.

III. Susunan Acara

- Pembukaan
- Pembahasan Rapat (Isi Rapat)
- Penutup

IV. Peserta Rapat

- Jumlah peserta rapat 14 (empat belas) orang (absen terlampir)

V. Jalannya Rapat

1. Pembukaan

Rapat dibuka pada pukul 14.00 WIB

2. Pembahasan Rapat sebagai berikut :

- Penyampaian Laporan SAKIP paling lambat tanggal 25 Januari 2019
- Pelaksanaan review terhadap pencapaian matriks indikator perolehan persentase kinerja tahun 2018 yang sebelumnya telah dibagikan kepada semua peserta rapat.
- Penyusunan LkjIP, Reviu IKU, Reviu Renstra, RKT 2019, RKT 2020, dan PKT 2019.
- Perolehan Indikator yang telah tercapai tidak akan berubah persentasenya pada tahun 2019 maupun pada tahun 2020.
- Indikator Kinerja Nomor 1.c. Persentase penurunan sisa perkara akan diturunkan pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan sisa perkara tahun 2018 sudah sedikit dan setiap tahunnya kemungkinan selisih sisa perkara juga tidak banyak sehingga persentasenya juga diturunkan. Mengingat jumlah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga tinggal sedikit.
- Indikator Kinerja Nomor 1.e. persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi akan dinaikan persentasenya pada tahun 2019 dan 2020 karena diharapkan perkara pidana anak bisa diselesaikan secara diversi di tahun 2019 dan akan ada diklat SPPA untuk Hakim.
- Indikator Kinerja Nomor 2.b. persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi akan diturunkan persentasenya pada tahun 2019 mengingat sangat susah menyelesaikan perkara perdata dengan mediasi.
- Indikator Kinerja Nomor 3.a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan akan diubah menjadi nihil atau tidak ada target pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan pada anggaran tahun 2019 tidak ada anggaran untuk perkara prodeo.

- Indikator Kinerja Nomor 3.b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan akan diubah menjadi nihil atau tidak ada target pada tahun 2019 atau 2020 dikarenakan pada anggaran tahun 2019 tidak ada anggaran untuk zitting plaats atau sidang di luar gedung pengadilan.
- Indikator Kinerja Nomor 6.a. persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai parameter objektif dinaikkan pada tahun 2019 dikarenakan diharapkan pada tahun 2019 akan ada pengisian jabatan-jabatan yang masih kosong pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun seperti Wakil Ketua dan Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- Indikator Kinerja Nomor 6.b persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian dinaikkan pada tahun 2019 dikarenakan diharapkan akan ada diklat untuk Hakim agar bisa memperoleh sertifikasi spesialis keahlian.
- 

3. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB

Mengetahui :  
Pimpinan Rapat,



IMAN SANTOSO, SH., MH.  
NIP. 19760513 200805 1 001

Notulis,



YUDHA PRADANA PUTRA, A.Md.  
NIP. 19910328 201503 1 001